

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)**

Lilies Setiartiti
Abstraksi

The role of local government in exploring local resource will determine success story of the local government. This study conclude that local government has a high dependence on central government especially in financing routine expenditure of the government. The role of local government can be done by increasing Penerimaan Asli Daerah (PAD).

**LATAR BELAKANG
MASALAH**

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR dimaksud adalah ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara

Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi Daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya, sekaligus merupakan tantangan yang tidak ringan bagi daerah itu sendiri. Hal ini berarti otonomi daerah tidak dapat di pandang sebagai sebuah kegagalan. Otonomi daerah harus di arahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Maka melalui pengelolaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (*Suwandi, 2000*). Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan Pusat, atau bahkan dapat menyebabkan

dialihkannya sebagian fungsi - fungsi Pemda ke tingkat pemerintahan yang lebih atas.

Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No. 22 dan UU NO. 25 tahun 1999 adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga ekonomi, Politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI. Di sisi lain kemampuan keuangan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran Pemda dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (*Halim, 2001*).

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa ciri utama suatu daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin kecil. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, maka masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Sejauh mana kinerja keuangan daerah kabupaten Bantul dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah.
- b. Bagaimana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan APBD Kabupaten Bantul.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah.
- b. Mengetahui peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Struktur Penerimaan APBD Kabupaten Bantul.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- a. Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang kesiapan Pemerintah Daerah setempat dalam menjelaskan kebijakan otonomi daerah, dan dengan gambaran tersebut dapat di pertimbangkan langkah dan tindakan Pemda dalam pelaksanaan pemerintahannya.
- b. Dari gambaran tentang kesiapan pelaksanaan otonomi daerah di harapkan dapat diidentifikasi potensi daerah, sehingga dapat di ketahui peluang-peluang baru sebagai sumber keuangan/ penerimaan daerah.

- c. Dapat dijabarkan masalah sekaligus prospek pembangunan bagi Pemerintah Daerah setempat.

KONTRIBUSI PENELITIAN

- a. Penemuan dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan/ input bagi Pemerintah Daerah setempat untuk menyusun berbagai Program guna meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonom daerah untuk mengkaji lebih jauh tentang kebijakan pemerintah tersebut.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan muncul berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada umumnya, dan DIY khususnya yang di harapkan dapat memberikan sumbanga bagi kerangka berpikir serta model pengembangannya.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah memiliki tujuan yang dibedakan atas dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan bila dilihat dari sisi

kepentingan Pemerintah Daerah, ada tiga tujuan utama, yaitu (Mahi, 2000):

1. Untuk mewujudkan *Political Equality*, Melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *Local Accountability*, Otonomi daerah akan mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *Local Responsiveness*, Otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Menurut UU NO. 22 tahun 1999 tujuan otonomi daerah pada dasarnya sama, yaitu diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan prakarsa dan peran serta masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu nyata, dinamis dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi daerah di dasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan, dan kebijakan yang benar-benar menjamin daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dinamis didasarkan pada

kondisi dan perkembangan pembangunan. Bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Sementara itu timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang komplek dan penuh ketidak pastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing (Sidik, 2000). Hal ini berarti subsidi atau bantuan APBD mulai berkurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus

sekecil mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara (*Musgrave, 1995*). Sesuai dengan ketentuan UU No. 22/1999 sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang terpisah.
 - Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - Bagian daerah dari perimbangan
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Pinjaman Daerah
- c. Lain-lain penerimaan yang sah

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah tampaknya PAD masih belum diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi, terutama karena 4 hal berikut (*Raksasa, 2000*)

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah.
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan administrasi pemungutan masih rendah.
4. Kemampuan administrasi

perencanaan dan pengawasan masih rendah.

Oleh karena itu daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang makin baik (PP No. 104/2000). Adapun pos-pos perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, SDA seperti : Kehutanan, perikanan, pertambangan, dan migas.
- b. Dana Alokasi umum, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, geografis, Jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga perbedaan antara daerah yang belum berkembang dapat di perkecil.
- c. Dana alokasi khusus, bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.

Dana perimbangan tersebut, merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling mengisi dan melengkapi.

Namun otonomi daerah yang merupakan salah satu kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat daerah dalam menghadapi perkembangan keadaan dari dalam maupun luar negeri termasuk tantangan persaingan global ternyata dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai ciri yang diharapkan muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai ciri yang diharapkan seperti yang diharapkan, seperti : (1) ciri demokrasi dalam pelaksanaannya terkendala dengan pemaksaan kehendak "mau menang sendiri", (2) ciri patisipasi yang diharapkan berlangsung di masyarakat ternyata terindusi dengan gejala mobilisasi dan *egoisme daerah yang anti pluralistik*, dan (3) ciri kreatif yang diharapkan meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaannya muncul sikap *eksploitatif*, seperti menaikkan tarif dan memperluas retribusi daerah/pajak daerah sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Penyimpangan yang terjadi tersebut ternyata tidak dapat terhindarkan akibat eforia otonomi yang tak terkontrol. Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus dan tidak diubah maka akan merugikan semua pihak. Kalau suatu ketika ada rating di dalam pelaksanaan otonomi, khususnya dalam pelayanan kepada publik, maka daerah yang salah dalam mempraktekkan otonomi akan turun ratingnya. Penurunan ini bukan tidak mustahil akan berdampak pada

besarnya investasi maupun PDRB secara keseluruhan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Keuangan Daerah

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Berikut ini disampaikan beberapa alat analisis kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada konsep Musgrave dan Musgrave (1980) dalam buku *Ekonomi Publik* oleh Sukanto Reksohadiprojo (2000) yaitu:

1. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dirumuskan sebagai berikut;

$$NJ = N_s Z_j$$
 dengan N_j = kebutuhan fiskal yuridiksi j ; N_s = biaya mengadakan tingkat pelayanan; dan Z_j = populasi target.
2. Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dirumuskan sebagai berikut :

$$C_j = t_s B_j$$
 dengan C_j = kapasitas fiskal yuridiksi j ; t_s = tarif fiskal standar, dan B_j = basis fiskal di j .
3. Upaya fiskal (*fiscal need*) dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{t_j \cdot B_j}{t_s \cdot B_j} = \frac{t_j}{t_s}$$

dengan E_j = upaya fiskal; t_j = tarif fiskal; dan t_s = standar fiskal
 Namun karena data di daerah tidak mendukung maka dipakai berbagai *proxy*. Untuk melihat kinerja keuangan daerah dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yaitu;

$$a. \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)

$$b. \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

$$c. \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Dengan $TPD = PAD + SB$, bila hasil perhitungan tinggi maka desentralisasinya tinggi (mandiri)

4. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan formula :

$$IPPP = \frac{\text{Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa - jasa publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}}$$

PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing masing daerah

Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal daerah makin besar .

5. Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity*) dengan formula :

$$SKF = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Daerah/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}}$$

$$FC = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar (KFs)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin tinggi.

6. Upaya fiskal (*tax effort*) dapat

$$KFs = \frac{\text{Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}}$$

dihitung dengan menggunakan rumus :

$$UPPADj = \frac{PADj}{\text{Kapasitas atau potensi PAD}}$$

Atau

$$UPPADj = \frac{PADj}{PBRBj(\text{tanpa migas})}$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standart (TPADs) yaitu :

$$TPADs = \frac{SPAD/PDRB}{S \text{ Kabupaten dan Kota}}$$

Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus :

$$IKPAD = \frac{UPPAD}{TPADs} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar upaya pajak daerah sekaligus menunjukkan posisi fiskal daerah adalah dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah semakin baik dengan fomula sebagai berikut :

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

dimana e = elastisitas ; Δ = perubahan

Tim LPEM - FE UII pada Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi (LPEM UI, 2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemauan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Total
2. Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin
3. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Total
4. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
5. Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Rutin per Kapita
6. Perbandingan PAD per Kapita dengan Pengeluaran Total per Kapita
7. Perbandingan PAD + Bagi Hasil Per Kapita dengan Pengeluaran Total Per Kapita
8. Perbandingan PAD + Bagi Hasil Per Kapita dengan pengeluaran Rutin Per Kapita

Jika hasilnya tinggi, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut nilai PDRB yang semakin tinggi dengan diikuti

pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin membaik, yang menggambarkan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Sebaliknya peningkatan nilai PDRB tanpa diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut dalam kondisi tidak baik.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul (dihitung melalui pertumbuhan pendapatan regional) pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan dua kali lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 3,06%. Tingginya pertumbuhan tersebut apabila dicermati lebih lanjut, merupakan pertumbuhan yang wajar dikarenakan pertumbuhan tersebut beranjak dari pertumbuhan yang rendah pada tahun sebelumnya. Secara garis besar sumbangan terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut, diberikan oleh sektor industri pengolahan yang mencapai pertumbuhan 5,86%. Yang memberikan andil terbesar jika dilihat dari sisi sektor kemudian diikuti dari sektor jasa 3,72%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 3,67%, sektor pertanian 3,61%, sektor bangunan 3,04%, dan sektor lainnya mencapai pertumbuhan dibawah 3,00%.

Struktur Produk Nasional Domestik Regional Bruto

Struktur perekonomian suatu daerah diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang pelaksanaan perekonomian yang telah dilaksanakan pada daerah tersebut.

Struktur PDRB dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder dan tersier.

Sembilan sektor Pendapatan Regional dapat digolongkan menjadi 3 kelompok sektor yaitu kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari seluruh kegiatan yang inputnya masih tergantung pada sumber daya alam, yaitu sektor pertanian dan penggalian. Kelompok sektor sekunder yaitu sektor yang inputnya berasal dari kelompok sektor primer yaitu sektor industri pengolahan ; lisrik, gas, dan air bersih dan bangunan . sedangkan sektor lainnya yang meliputi perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa digolongkan menjadi kelompok sektor tersier.

Pada tahun 1999 ataupun tahun 2000 kelompok sektor tersier memberikan kontribusi cukup tinggi di bandingkan dengan kelompok sektor primer maupun sekunder. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa terutama jasa pemerintahan umum.

Laju pertumbuhan antar sektor dalam struktur tidak memberikan gambaran yang signifikan walaupun terlihat ada perubahan struktur pendapatan regional, dari kelompok sekunder dan tertier menuju kelompok primer dengan perubahan sebesar 0,23 %. Searah dengan kontribusi persektor, kontribusi PDRB terbesar adalah pertanian, sehingga itu perubahan struktur masih mengarah ke perubahan primer.

Kondisi Keuangan Daerah.

APBD merupakan kebijakan keuangan daerah tahunan yang disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD sudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Berikut kondisi keuangan daerah Pemda Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2000 dan 2001.

Kesimpulan dan Saran

1. Keberhasilan otonomi daerah memerlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan juga merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintah daerah dapat dicapai kemandiriannya. Berdasarkan hasil analisis, kesiapan pemerintah Kabupaten Bantul dari sisi keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Derajat Desentralisasi Fiskal yang dihitung atas dasar rasio antara PAD terhadap TPD, rasio antara BHPBP terhadap TPD, dan rasio antara SB

- terhadap TPD, menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini disebabkan antara lain adanya perubahan dalam struktur anggaran (gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji PNS) memperbesar total APBD, yang sumber penerimaannya berasal dari dana sumbangan Pemerintah Pusat.
- b. Bila dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja PEMDA masih mengindikasikan adanya ketergantungan pada Pemerintah Pusat.
 - c. Kabupaten Bantul memiliki

- kapasitas fiskal yang sama besar (17), sehingga tidak perlu menutup dengan dengan bantuan Pemerintah Pusat
- d. Posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB, menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan atas PDRB harga konstan dengan PDRB atas harga berlaku. Namun demikian sumbangan PDRB terhadap PAD sangat strategis perannya.
2. Dapat dilihat bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Bantul dari segi kemampuan keuangan daerah masih kurang (terutama aspek desentralisasi fiskal) sehingga perlu diupayakan peningkatan PAD baik

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2000 s/d 2001 (RP.000)

Uraian	2000	Uraian	2002*)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan	97.002.853	Penerimaan	223.337.168
Sisa Tahun Lalu	4.344.621	Sisa Tahun Lalu	5.235.914
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7.074.418	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.686.129
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	8.069.030	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	8.988.702
Subsidi	55.171.355	Subsidi	0
Bantuan Pembangunan	19.799.529	Bantuan Pembangunan	0
Pinjaman Pemerintah Daerah	2.543.900	Pinjaman Pemerintah Daerah	0
		Bagian Lain Penerimaan yang Sah	6.975.811
		Pos Dana Alokasi Umum	180.450.612
Pengeluaran	97.002.853	Pengeluaran	248.804.665
Pengeluaran Rutin	65.021.442	Pengeluaran Rutin	210.402.449
Pengeluaran Pembangunan	26.745.497	Pengeluaran pembangunan	30.907.833
Sisa Perhitungan	5.235.914	Sisa Perhitungan	7.494.383

Sumber data : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Bantul

secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah. Sumber penerimaan daerah dapat digali seoptimal mungkin. Dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak, antara lain :

a. Pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam rangka penggalian keuangan daerah.

- b. Penyusunan PERDA yang representatif bagi penduduk, sehingga tidak mengganggu dan tidak membebani mereka.
- c. Melakukan perhitungan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, sehingga biaya pemungutan pajak.
- d. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan sehingga kebocoran dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- I Mada Suwandi, *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2000.
- Machfud Sidik, *Kebijakan Fiskal Nasional Untuk Mendukung Otonomi Daerah*, Seminar Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, 2000.
- Nick Deves, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Raksasa Mahi, *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Eksistensi*, CSIS, Jakarta, 2000.
- Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Republika Indonesia UU No.22 Tahun 1999 : *Pemerintah Daerah*, Jakarta, 1999.
- Republika Indonesia UU No.25 1999: *Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat*, Jakarta 1999.
- _____, UU No. 22 tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah*.
- _____, PP No. 104 tahun 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Sukamto Rekso hadiprojo, *Ekonomi Publik*, Materi Kuliah MEP, UGM, 2000.